



Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara

M. Irvan Fahrul Sitorus

UIN-Sumatera Utara

Korespondensi penulis: irvanfahrul09@gmail.com

Isnaini Harahap

UIN-Sumatera Utara

Rahmat Daim Harahap

UIN-Sumatera Utara

Abstract. *This research aims to analyze the influence of regional financial performance on capital expenditure allocation. The data used is secondary data from 2018 to 2021 which comes from regional financial reports. Data analysis was carried out using multiple linear regression. The research results show that regional financial performance has a positive and significant effect on capital expenditure allocation. This shows that the better the regional financial performance, the greater the capital expenditure allocation that can be allocated. The ability of regional governments to manage their regional finances can be measured by analyzing regional financial performance. Regional financial performance consists of financial ratios. These financial ratios are used to assess regional financial independence in financing the implementation of regional autonomy, measure effectiveness and efficiency in realizing regional income, measure the extent of regional government activity in spending its regional income, measure the contribution of each source of income in the formation of regional income, see growth/development of income and expenditure during a certain period of time.*

Keywords: *Regional Financial Performance, Capital Expenditure Allocation, Regional Revenue Budget (APBD).*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal. Data yang digunakan adalah data sekunder tahun 2018 hingga 2021 yang berasal dari laporan keuangan daerah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Ini menunjukkan bahwa semakin baik kinerja keuangan daerah, semakin besar alokasi belanja modal yang dapat dialokasikan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat diukur dengan analisis kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah terdiri dari rasio-rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Kata kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Alokasi Belanja Modal, Anggaran Pendapatan Daerah (APBD).

LATAR BELAKANG

Berlakunya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 penyelenggaraan pemerintah daerah harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana pemerintah daerah memiliki wewenang mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. (Miranti Putri Retno, 22:2017)

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggung jawab. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik menyangkut sumber daya manusia (SDM), dana maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. (Praza, Eko Indra, 11:2016).

Penerapan otonomi daerah ini bertujuan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah setempat dalam menggali potensi serta menentukan alokasi sumber dayanya ke dalam belanja daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerahnya. Kemampuan. (Arif, M, And Fefri Indra Arza, 27:2019) Harapan dari pemberian otonomi daerah, pemerintah daerah semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun pengelolaan keuangan daerah. Hak otonomi yang diperoleh pemerintah daerah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah. Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. (Nowventina Evenita, 106: 2016) Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat diukur dengan analisis kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah terdiri dari rasio-rasio keuangan.

Rasio-rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki daerah setiap tahunnya.

Menurut Halim (2008:241) rasio pertumbuhan pendapatan daerah dapat menunjukkan seberapa besar kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan pendapatannya dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin tingginya pertumbuhan pendapatan daerah dan bernilai positif setiap tahunnya mengindikasikan bahwa pemerintahan daerah telah mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerahnya. Pertumbuhan pendapatan daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya menyebabkan pemerintah daerah mampu memenuhi segala kebutuhan daerahnya dan memberikan indikasi bahwa keuangan daerah telah mampu dikelola dengan baik. (Ni Putu Gina Sukma Antari, Ida Bagus Panji Sedana, 2018)

Rasio-rasio yang biasa digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan daerah adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio desentralisasi keuangan daerah, rasio pertumbuhan. Rasio-rasio dalam analisis kinerja keuangan daerah ini berbeda dengan rasio yang digunakan dalam

mengukur kinerja keuangan perusahaan. Sebab rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan daerah merupakan perbandingan angka-angka dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain: rasio kemandirian (otonomi fiskal), rasio efektivitas dan efisiensi PAD, rasio aktivitas (rasio keserasian), dan rasio pertumbuhan. Berdasarkan penelitian Sularso (2011) untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu: derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan (Kristian Joni, 327: 2020).

Tabel 1.

Rasio Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020

Tahun	Kemandirian Keuangan Daerah	Efektivitas PAD	Efisiensi Keuangan Daerah	Belanja Modal
2018	44,39	98,37	86,54	14,23
2019	44,50	99,68	77,76	12,29
2020	42,82	101,78	84,67	13,07

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2018 sampai 2020 berada di atas 40% hal ini menunjukkan kemandirian keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara dinilai baik. Rasio efektivitas PAD pada tahun 2018 dan 2019 dinilai tidak efektif karena berada pada nilai <100%, sedangkan di tahun 2020 dinilai efektif karena rasio >100%. Rasio efisiensi keuangan daerah dari tahun 2018-2020 menunjukkan nilai di bawah 100% hal ini menunjukkan bahwa efisiensi keuangan daerah dinilai efisien. Pemerintah daerah sebagai pelaksana utama pembangunan di daerah mempunyai kewajiban dalam melaksanakan program-program pembangunan yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat daerahnya.

Program pembangunan ini, salah satunya ditentukan oleh faktor pengelolaan keuangan daerah. Kemampuan pengelolaan keuangan mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah menggali sumber daya keuangan daerahnya serta mengalokasikannya ke belanja sesuai dengan kebutuhan daerah yang harus berorientasi kepada kepentingan publik; ketersediaan layanan sosial yang cukup dan berkualitas, perbaikan dan penyediaan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan serta penambahan dan perbaikan di bidang infrastruktur, bangunan, peralatan, dan harta tetap lainnya. Pembangunan infrastruktur dan sarana/prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana/prasarana memadai, masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada meningkatnya produktivitas masyarakat. Tentunya, untuk penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana, pemerintah harus dapat mengalokasikan belanja modal yang tidak sedikit.

Kota Medan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tentunya ikut andil dalam hal ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari website www.djpb.kemenkeu.go.id sampai dengan 29 Juni 2022, realisasi Belanja APBN lingkup wilayah kerja KPPN Medan I mencapai Rp. 3,44 Triliun atau 35,54 persen dari pagu anggaran sebesar Rp. 9,68 Triliun, mengalami penurunan sebesar 8,48 persen. Kontributor utama atas penurunan realisasi belanja tersebut berasal dari komponen Belanja Modal yang turun sebesar 10,12 persen dan Belanja Transfer yang turun sebesar 12,57 persen. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020”.

KAJIAN TEORITIS

Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Sumarjo, kinerja keuangan daerah didefinisikan sebagai pencapaian dari kegiatan atau program pemerintahan, baik yang baru akan dilaksanakan maupun yang telah tercapai, terhadap penggunaan anggaran yang dapat diukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, yang dapat dilihat dengan tingkat efisiensi terhadap layanan yang telah disediakan terhadap publik (Triyogi Muhammad, 31:2021). Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Jika

pencapaian sesuaidengan apa yang telah direncanakan, maka kinerja yang dilakukan dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik. Sedangkan, Kinerja Keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan.

Keuangan daerah secara sederhana dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak- pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku (Susanti dan Saftiana, 2008). Menurut Lohan (2013) pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Menjelaskan pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan kualitas jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. (Leki, Y., Naukoko, A. T., & Sumual, J. I, 165-166: 2018)

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah asset atas kekayaan daerah dan berakiba menambah asset atau kekayaan daerah dan berakibat menambah belanja yang bersifat rutin (E. Yanuar, 10:2019). Belanja modal diklasifikasikan dalam dua kelompok, kelompok yang manfaatnya dapat langsung dinikmati masyarakat misalnya: pembangunan jembatan, pembelian mobil ambulans untuk umum dan lain-lain. Kelompok kedua adalah belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak dinikmati langsung oleh aparatur misalnya, pembangunan Gedung dewan, pembelian mobil dinas dan lain-lain. Hampir semua anggaran belanja modal mengandung komitmen adanya pengeluaran dalam jangka yang cukup Panjang.

Sesuai dengan Undang – undang No.32 tahun 2004, yang dimaksud dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Melalui APBD arah, tujuan, serta prioritas pembangunan daerah yang akan dan sedang dikerjakan dapat

diketahui. Menurut UU no. 33 tahun 2004 Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada dasarnya belanja terdiri dari dua jenis belanja, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

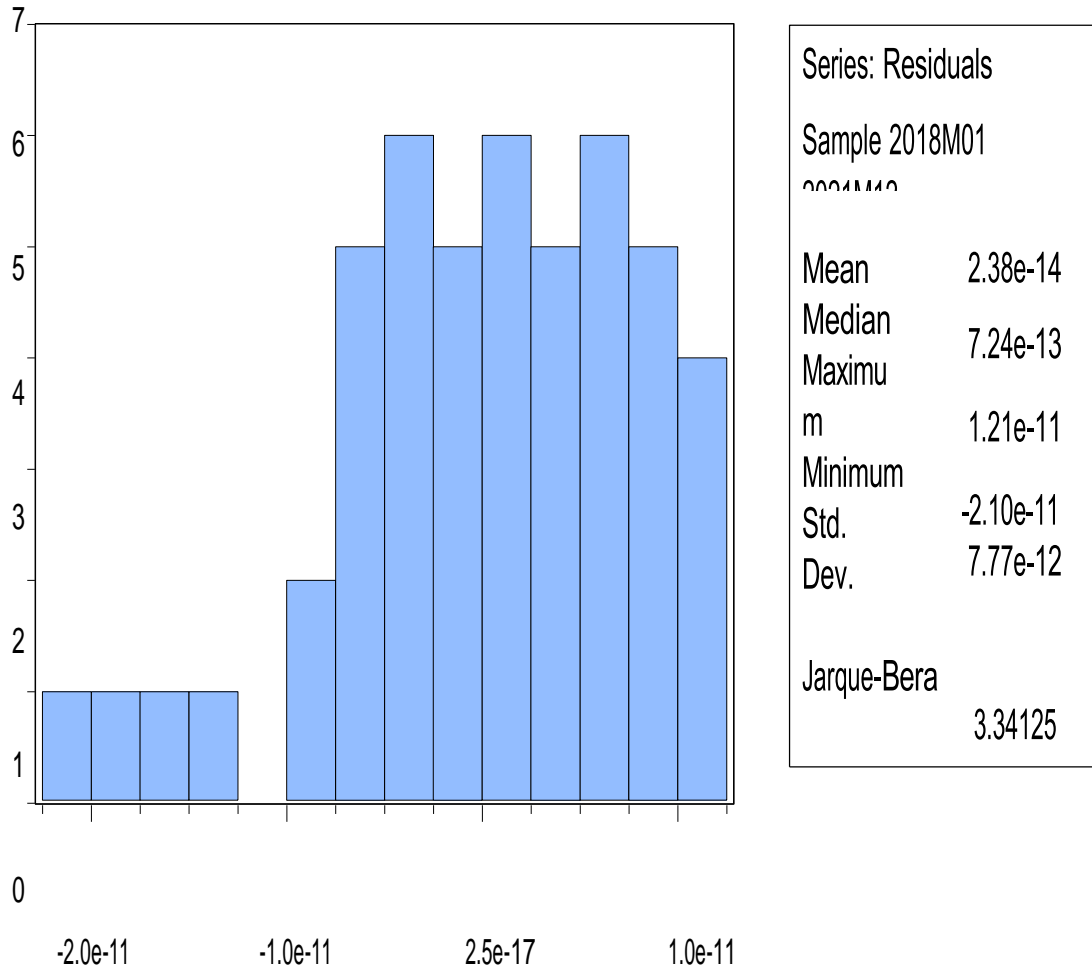
METODE PENELITIAN

Metode penelitian atau pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain penelitian menggunakan desain kausal. Desain kausal adalah penelitian yang bertujuan menganalisa hubungan sebab akibat antara variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi). peneliti menggunakan data time series dan cross section yang bersifat kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik atau angkadan merupakan data sekunder. Dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal kota Medan tahun 2018-2020. Teknik analisis kuantitatif (statistik) menggunakan analisis regresi linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Analisis

Uji Normalitas



Sumber : Lampiran, Data Diolah 2023

Gambar 1.
Hasil Uji Normalitas

Terlihat pada gambar di atas bahwa nilai probability sebesar 0,188129 sedangkan untuk nilai α sebesar 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa data yang digunakan sudah berdistribusi normal dengan syarat $0,188129 > 0,05$.

Uji Multikoleniaritas

Tabel 2.
Uji Multikoleniaritas

Variance Inflation Factors
Date: 02/01/23 Time: 05:23
Sample: 2018M01 2021M12
Included observations: 48

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.31E+13	28340.86	NA
RKD	0.410671	1513.517	1.353162
REP	0.860160	35097.99	6.280661
REKD	0.000156	14.30593	6.105647

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Centered VIF dari masing-masing variabel bebas tidak lebih besar dari 10. Artinya tidak terjadi gejala multikoleniaritas pada model regresi.

Uji Autokorelasi

Tabel 3.
Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	651.7925	Prob. F(2,137)	0.3021
Obs*R-squared	130.3056	Prob. Chi-Square(2)	0.2415

Berdasarkan hasil uji di atas dapat diketahui nilai Probability f hitung sebesar 0,3021 dimana nilai ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak ditemukannya masalah autokorelasi.

Uji Heteroskedetisitas

Tabel 4.
Uji Heteroskedetisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	13.32981	Prob. F(4,139)	0.1060
Obs*R-squared	39.92304	Prob. Chi-Square(4)	0.3084
Scaled explained SS	44.51507	Prob. Chi-Square(4)	0.0558

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil uji heterokedetisitas menunjukkan nilai Probabilitas Obs *-Square= 0,0558 > α (0,05) maka H_0 diterima dengan kata lain model regresi terbebas dari masalah heterokedetisitas.

Uji Regresi Linear Berganda

Regresi berganda bertujuan untuk melihat nilai variabel terikat Y jika terdapat 2 variabel bebas X atau lebih.

Tabel 5.

Uji Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: ABM_Belanja Modal
 Method: Least Squares
 Date: 01/19/23 Time: 21:42
 Sample: 2018M01 2021M12
 Included observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-71.60834	3.01E-10	-2.381511	0.0000
RKD	1.404082	5.14E-12	2.731211	0.0000
REP	0.280447	1.49E-12	1.881111	0.0000
REKB	-0.047104	9.59E-13	-4.913310	0.0000
R-squared	0.897630	Mean dependent var		13.03208
Adjusted R-squared	0.986640	S.D. dependent var		0.393968
S.E. of regression	8.033312	Akaike info criterion		-48.17729
Sum squared resid	2.844221	Schwarz criterion		-48.02135
Log likelihood	1160.255	Hannan-Quinn criter.		-48.11836
F-statistic	3.775222	Durbin-Watson stat		0.049576
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel di atas model estimasinya adalah sebagai berikut : $ABM = 7.160834 + 1.404082RKD + 0.280447REP - 0.047140REKD + e$

Uji Hipotesis

1. Uji T-Statistik

Tabel 6.
Uji T-Statistik

Dependent Variable: Y_Belanja Modal
Method: Least Squares
Date: 01/19/23 Time: 21:42
Sample: 2018M01 2021M12
Included observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-71.60834	3.01E-10	-2.381511	0.0000
RKD	1.404082	5.14E-12	2.731211	0.0000
REP	0.280447	1.49E-12	1.881111	0.0000
REKD	-0.047104	9.59E-13	-4.913310	0.0000
R-squared	0.897630	Mean dependent var		13.03208
Adjusted R-squared	0.986640	S.D. dependent var		0.393968
S.E. of regression	8.033312	Akaike info criterion		-48.17729
Sum squared resid	2.844221	Schwarz criterion		-48.02135
Log likelihood	1160.255	Hannan-Quinn criter.		-48.11836
F-statistic	3.775222	Durbin-Watson stat		0.049576
Prob(F-statistic)	0.000000			

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial digunakan uji t, dengan cara membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel.

2. Uji F-Statistik

Tabel 7.
Uji F-Statistik

Dependent Variable: ABM_Belanja Modal
Method: Least Squares
Date: 01/19/23 Time: 21:42
Sample: 2018M01 2021M12
Included observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-71.60834	3.01E-10	-2.381511	0.0000
RKD	1.404082	5.14E-12	2.731211	0.0000
REP	0.280447	1.49E-12	1.881111	0.0000
REKD	-0.047104	9.59E-13	-4.913310	0.0000
R-squared	0.897630	Mean dependent var		13.03208
Adjusted R-squared	0.986640	S.D. dependent var		0.393968
S.E. of regression	8.033312	Akaike info criterion		-48.17729
Sum squared resid	2.844221	Schwarz criterion		-48.02135
Log likelihood	1160.255	Hannan-Quinn criter.		-48.11836
F-statistic	3.775222	Durbin-Watson stat		0.049576
Prob(F-statistic)	0.000000			

Jika dilihat dari tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa F-statistik adalah 3.77022, yang mana nilai tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan nilai F tabel (3.25). Dengan nilai Prob F-statistik (0.00000) lebih kecil jika dibandingkan dengan 0.05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengujian hipotesis H_a diterima dan H_0 ditolak. Dengan artian bahwa secara bersamaan Rasio Kemandirian Daerah (RKD), Rasio Efektivitas PAD (REP), dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) berpengaruh Terhadap Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021.

3. Uji R Square

Tabel 8.
Uji R Square

Dependent Variable:
ABM
Method: Least Squares
Date: 01/19/23 Time: 21:42
Sample: 2018M01 2021M12
Included observations:
48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-71.60834	3.01E-10	-2.381511	0.0000
RKD	1.404082	5.14E-12	2.731211	0.0000
REP	0.280447	1.49E-12	1.881111	0.0000
REKD	-0.047104	9.59E-13	-4.913310	0.0000
R-squared	0.897630	Mean dependent var		13.03208
Adjusted R-squared	0.986640	S.D. dependent var		0.393968
S.E. of regression	8.033312	Akaike info criterion		-
				48.17729
Sum squared resid	2.844221	Schwarz criterion		-
				48.02135
Log likelihood	1160.255	Hannan-Quinn criter.		-
				48.11836
F-statistic	3.775222	Durbin-Watson stat		0.049576
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan hasil regresi di atas maka dapat diperoleh nilai koefisien determinasi R square sebesar 0.873000 atau sebesar 87.3%. Hal ini memperlihatkan bahwa variabel-variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Rasio Kemandirian Daerah (RKD), Rasio Efektivitas PAD (REP), dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menjelaskan besarnya pengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu sisanya 12.7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal

Dari hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa Variabel nilai Rasio Kemandirian keuangan daerah (RKD) memiliki nilai t-hitung sebesar 2.38011. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel dengan nilai (1,026192) dengan sg t (0.0000) lebih kecil jika dibandingkan dengan 0.05. Maka dapat disimpulkan H1 diterima dan H0 ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa secara parsial Kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021. Menurut Halim kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatannya dengan menggunakan pendapatannya. Semakin rendah rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat semakin rendah, demikian juga sebaliknya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dijabarkan oleh penulis dimana rasio keuangan daerah memiliki hasil yang positif terhadap belanja modal. Hal itu menjelaskan bahwa apabila Kemandirian keuangan meningkat maka belanja modalpun meningkat. Berdasarkan uji hipotesis atas pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal diketahui bahwa dalam penelitian ini kinerja keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian daerah dan rasio efektivitas PAD. Secara umum penelitian ini sejalan dengan Arsa (2015) pada kabupaten/ Kota Propinsi Bali 2006 – 2013.

Pengaruh Efektifitas PAD Terhadap Alokasi Belanja Modal

Hasil penelitian diatas adalah Variabel nilai Rasio Efektivitas PAD (REP) memiliki nilai t-hitung sebesar 2.73011. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel dengan nilai (1,026192) dengan sg t (0.0000) lebih kecil jika dibandingkan dengan 0.05. Maka dapat disimpulkan H1 diterima dan H0 ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa secara parsial Efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021. Efektivitas merupakan salah satu standar untuk mengukur keberhasilan dari suatu organisasi atau entitas dalam upaya meraih tujuan yang telah ditargetkan oleh organisasi atau entitas. Kemampuan Pemda (Pemerintah Daerah) dalam mengatur penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan merealisasikan target yang tertera di APBD yang telah disesuaikan dengan potensi sumber daya daerah tergambar pada rasio

efektivitas PAD (Praza, 2016). Rasio efektivitas PAD atau Pendapatan Asli Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Desa hingga sesuai dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Ketika penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD terhadap target penerimaan PAD semakin besar maka rasio efektivitas pada suatu daerah akan semakin besar atau sebaliknya. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas maka dapat dikatakan daerah telah menggunakan PAD secara efektif dalam merealisasikan program kerja untuk melaksanakan pembangunan dan menyejahterakan masyarakat atau sebaliknya (Andriyani et al., 2020). Ketika daerah mampu merealisasikan atau bahkan melebihi target penerimaan PAD yang telah ditetapkan, maka nilai rasio efektivitas pada suatu daerah akan semakin tinggi dan begitu pula sebaliknya (Andriyani et al., 2020). Rasio efektivitas PAD mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mencapai target pendapatan yang ditetapkan. Realisasi PAD yang melebihi target yang telah ditetapkan dapat digunakan untuk belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Rahayu, 2019) serta (Gerungan et al., 2015), menunjukkan bahwa efektivitas PAD memiliki pengaruh signifikan positif terhadap alokasi belanja modal.

Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal

Hasil yang diperoleh dari penelitian diatas adalah Variabel nilai Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) memiliki nilai t-hitung sebesar 4.91011. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel dengan nilai (1,026192) dengan α (0.0000) lebih kecil jika dibandingkan dengan 0.05. Maka dapat disimpulkan H1 diterima dan H0 ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa secara parsial efisiensi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021. Efisiensi dan produktivitas merupakan hal yang berkaitan erat. Suatu kegiatan operasional yang sudah dijalankan dapat memenuhi kriteria efisien apabila hasil kerja yang berupa produk, jasa, atau hal lainnya dapat diraih dengan memanfaatkan sumber daya dan dana seminimal mungkin (Mahmudi, 2016). Rasio efisiensi adalah rasio perbandingan realisasi dalam pengeluaran dan penerimaan daerah. Semakin minim hasil dari pengukuran rasio ini, maka akan semakin efisien kinerja keuangan, dan sebaliknya. Sehingga suatu program kerja Pemerintah Daerah dapat dikatakan efisien apabila pelaksanaannya telah mencapai hasil (output) yang maksimal dengan biaya (input) minimal sehingga dapat memperoleh hasil yang diinginkan (Ayu et al., 2019). Kinerja keuangan dari suatu daerah dikatakan

semakin efisien apabila hasil dari pengukuran rasio ini juga semakin kecil dan berlaku sebaliknya. Dengan rasio efisiensi yang bagus pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola pendapatannya untuk dialokasikan pada pengeluaran daerah secara maksimal (Andriyani et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh (Andriyani et al., 2020) serta (Irma Novita & Nunung Nurhasanah, 2020) menunjukkan bahwa bahwa rasio efisiensi keuangan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap alokasi belanja modal.

Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Jika dilihat dari tabel 47 di atas dapat diketahui bahwa F-statistik adalah 3.77022, yang mana nilai tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan nilai F tabel (3.25). Dengan nilai Prob F-statistik (0.00000) lebih kecil jika dibandingkan dengan 0.05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengujian hipotesis H_a diterima dan H_0 ditolak. Dengan artian bahwa secara bersamaan Kemandirian Keuangan, Efektivitas PAD, dan Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh Terhadap Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021. Belanja modal merupakan belanja yang memiliki peranan penting bagi pembangunan suatu daerah, dimana pengalokasian dari belanja modal digunakan untuk pelayanan publik yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga porsi daribelanja modal seharusnya lebih diutamakan. Karena semakin besar rasio belanja modal dalam struktur APBD diharapkan akan semakin baik pengaruhnya bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hasil uji ini menolak hipotesis $H_{a.6}$ yang menyatakan rasio kontribusi BUMD berpengaruh positif dan signifikan pada alokasi belanja modal. Kondisi ini terjadi kemungkinan disebabkan karena penerimaan laba BUMD dari tahun ke tahun relatif masih kecil, sehingga kurang mampu membantu dalam pengalokasian belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sularso dan Restianto (2011) yang menyatakan derajat kontribusi BUMD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan secara parsial Kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021. Secara parsial Rasio Efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021. Secara

parsial efisiensi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021. Secara bersamaan Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efektivitas PAD, dan Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh Terhadap Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021.

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang ingin disampaikan adalah Pemerintah diharapkan melakukan identifikasi ulang terkait kebutuhan dan besaran alokasi pada setiap anggaran agar terjadi efektifitas anggaran. Untuk penelitian berikutnya, peneliti berharap dapat ditambahkan beberapa variabel independen lain seperti rasio pertumbuhan PAD dan rasio kontribusi BUMD serta memperbanyak sampel penelitian sehingga data yang dihasilkan dapat lebih akurat.

DAFTAR REFERENSI

- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). *Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah* (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Arif, M, and Fefri Indra Arza, 'Analisis Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 – 2017', *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1.1 (2019), 35–49
- Azhari Akmal Tarigan, *Buku Panduan Penulis Skripsi* (Medan: Febi press, 2015) Fathah, Rigel Nurul, 'Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja Pada
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV PustakaIlmu, 2020)
- Havid sulasro, yanuar E. Restianto, 'Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal, Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten, Kota Di Jawa Tengah', *Media Riset Akuntansi*, Vol.1 No.2
- Leki, Y., Naukoko, A. T., & Sumual, J. I. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten halmahera barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(5).
- Muhammad Arif, 'Universitas Sumatera Utara', 2019
- Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul', *Ebbank*, 8.1 (2017), 33–48 Padang, Nowventina Evenita, 'Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Dana Alokasi Khusus Sebagai Variabel Moderating Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara', *Tesis*, 2016, 1–90
- Putri Retno Miranti, 'ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011-2015', *Ley N° 28294*, 22, 2004, 1–5 (2017)
- Putri, Rinta Seftyawati, and Sri Rahayu, 'Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Barat', *Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi (JASa)*, 3.2 (2019), 256–68
- Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RD', 2017
- Triyogi, Muhammad, Septi Anggoro, Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi, Ilmu Ekonomi, Yayasan Keluarga, and others, 'Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara Ringkasan Skripsi', 2021
- Widodo, Edy, Eli Suriani, Intan Putri, and Gita Evi, 'Analisis Regresi Panel Pada Kasus Kemiskinan Di Indonesia', *Prosiding Seminar Nasional Penelitian*, 2 (2019), 710–1